

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya gas alam adalah hasil bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Salah satu jenis bahan bakar yang sering digunakan untuk mendorong aktivitas sehari-hari adalah minyak tanah. Dahulunya minyak tanah merupakan bahan bakar yang paling populer digunakan oleh hampir keseluruhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan subsidi terhadap pembelian bahan bakar tersebut, di karenakan masih banyaknya kalangan masyarakat menengah ke bawah masih belum mampu untuk membeli. Seiring berjalannya waktu, persediaan minyak tanah yang semakin menipis menjadi alasan utama pemerintah menghapuskan subsidi tersebut dan menciptakan solusi dengan menggunakan gas elpiji. Gas elpiji juga merupakan bagian dari hasil bumi yang hadir dari kemajuan teknologi.

Literatur internasional dan analisis studi kasus reformasi subsidi bahan bakar fosil, termasuk LPG, menunjukkan bahwa reformasi subsidi harus mengikuti tiga prinsip utama, yaitu memperbaiki dan mendepolitisasi mekanisme penetapan harga agar dapat secara bertahap menerapkan harga pasar; memastikan bahwa dampak reformasi, khususnya terhadap kelompok-kelompok rentan, telah dipahami dengan baik dan dapat dikelola dengan kebijakan tertarget; serta membangun dukungan untuk reformasi melalui konsultasi dan komunikasi (Toft, 2016). Dihilangkannya subsidi terhadap minyak tanah oleh pemerintah menyebabkan harga menjadi tinggi sehingga masyarakat beralih menggunakan gas LPG untuk memenuhi kebutuhan akan energi. Penghapusan subsidi minyak tanah ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran yang berasal dari subsidi. Dengan

demikian pemerintah mengharapkan seluruh masyarakat melakukan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas elpiji. Pemerintah melalui Pertamina melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong penggunaan gas elpiji yang efektif. Adaptasi ini perlu dilakukan agar masyarakat khususnya ibu rumah tangga paham akan penggunaan kompor gas melalui gas elpiji.

Program konversi minyak tanah ke gas elpiji di Indonesia dilakukan kerjasama antara pemerintah melalui Pertamina serta pengusaha yang bergerak di sektor industri pabrikan kompor elpiji dan tabung gas elpiji. Kementerian ESDM RI, selaku pemerintah sebagai pengawas program sosialisasi dan distribusi agar pelaksanaan yang dilakukan dapat efektif dan tepat sasaran. Pemerintah menyediakan sumber energi baru yaitu LPG yang dikemas dalam 2 jenis kemasan, yaitu kemasan tabung subsidi (3 kg) dan tabung non subsidi (5,5 kg dan 12 kg). Kemasan lpg 3 kg merupakan kemasan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat dikarenakan harga yang relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat, sedangkan kemasan tabung 5,5 kg dan 12 kg sangat sedikit masyarakat yang memilih, sehingga dapat dikatakan hanya sebagai pelengkap. Jika dilihat struktur pasar dari sisi produsen maka gas lpg 3 kg merupakan pasar monopoli sebab hanya diproduksi oleh Pertamina, sedangkan jika dilihat dari sisi penjual, maka struktur pasar adalah oligopoli.

Tabel 1.1  
Kebutuhan Gas Bumi

<b>Periode Tahun</b>	<b>% Kebutuhan</b>
2015-2020	6% per tahun
2020-2025	7% per tahun
2025-2030	5% per tahun
Rata-rata	6% per tahun

Sumber : (ESDM, 2020)

Berdasarkan data penelitian Kementerian ESDM RI (ESDM, 2020) dalam tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa kebutuhan akan gas bumi akan mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Kebutuhan akan gas bumi untuk tahun 2015-2020 akan meningkat sebesar 6% per tahun. Sedangkan pada tahun 2020-2025 kebutuhan akan gas bumi meningkat sebesar 7% dan pada tahun 2025-2030 meningkat sebesar 5% pertahun (ESDM, 2020). Berdasarkan data BPS (Utara, 2019) di Sumatera Utara persentase penggunaan bahan bakar utama gas elpiji rumah tangga tahun 2019 sebanyak 88,99%. Persentase ini adalah yang terbesar dari jenis bahan bakar lain yang digunakan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa persentase yang digunakan akan mengalami peningkatan setiap tahun. Sedangkan di Kota Pematangsiantar di tahun yang sama memiliki persentase yang lebih tinggi, yaitu 94,78% dalam penggunaan bahan bakar utama gas elpiji rumah tangga.

Selanjutnya, agar proses produksi dan distribusi dapat berjalan dengan tertib pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai produksi dan distribusi LPG 3 Kg yang telah diatur oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM melalui Permen Nomor 26 Tahun 2009 (Dirjen Migas, 2019) tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. Peraturan tersebut mengartikan bahwa sistem distribusi LPG 3 kg mengalami perubahan sistem dari sistem distribusi terbuka (*open system*) menjadi sistem distribusi tertutup (*closed system*). Sistem distribusi terbuka (*open system*) diartikan bahwa pangkalan/sub agen boleh mengambil LPG dari sejumlah agen, bahkan pengecer dapat mengambil LPG langsung ke sejumlah agen dan agen boleh mengambil LPG dari berbagai SPPBE. Sedangkan distribusi tertutup (*closed system*) diartikan bahwa suatu sistem distribusi yang diterapkan untuk pengisian LPG di mana agen LPG di satu wilayah hanya dapat mengisi LPG di stasiun (SPPBE) yang ada di wilayah dan hanya diperbolehkan mendistribusikan LPG di wilayah yang sudah ditetapkan.

Menurut (Toft et al., 2016) seharusnya, penjualan gas elpiji harus sesuai dengan harga pasar. Adapun realita yang terjadi di banyak negara, hal itu tidak dapat dilakukan pada waktu yang singkat. Prosesnya banyak negara perlu menerapkan transisi menuju harga pasar dengan menaikkan harga secara bertahap yang didasarkan dengan suatu kebijakan penetapan harga. Apabila kebijakan tersebut telah menaikkan harga ke harga pasar, kebijakan tersebut harus tetap berada pada ruang lingkup sistem penepatan harga yang dominan hingga para pengambil keputusan politik sepakat bahwa harga pasar sudah dapat diterima, dan sudah ada cukup investasi untuk menstimulasi pasar kompetitif dan dapat ditegakkan (*well-enforced*).

Dalam sudut pandang Islam, Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam A-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 (Departemen Agama, 2015):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat di dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan

jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh syara' (Tamama, 2019)

Berdasarkan peraturan tersebut gas LPG 3 kg ini ditetapkan harga eceran (HET) tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara adalah Rp. 14.800,-/tabung. Namun akibat *system* pendistribusian di Provinsi Sumatera Utara masih berantakan seperti penyebaran sub agen penjual gas elpiji tidak merata, maka mengakibatkan harga yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan HET yang di anjurkan oleh pemerintah. Banyaknya harga yang bervariasi di pasar tersebut sering ditemukan di warung-warung dan pengecer illegal yang tidak memiliki izin usaha. Hal ini patut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah agar harga yang diterima dapat lebih stabil. Dengan kondisi seperti ini, maka harga sangat ditentukan oleh produsen atau penjual dan masyarakat hanya sebagai *price taker* sebab sama sekali tidak dapat mempengaruhi harga sebab mereka tidak mempunyai atau sangat sedikit sekali pilihan barang pengganti.

Kenyataan yang terjadi di Pematangsiantar adalah harga yang diterima oleh masyarakat lebih dari harga yang telah ditentukan bahkan sangat sedikit atau hampir tidak ada masyarakat yang dapat memperoleh harga gas LPG 3 kg seharga Rp. 14.800,- atau jika dibulatkan menjadi Rp. 15.000,-/tabung. Bahkan ada kecenderungan masyarakat mendapatkan harga sekitar Rp. 18.000,- hingga Rp. 22.000,-/tabung. Selain itu pada waktu-

waktu tertentu terjadi kelangkaan akan gas lpg 3 kg ini, sehingga harga yang diterima oleh masyarakat sebagai konsumen akhir dapat mencapai Rp. 22.000,- hingga Rp, 25.000,- /tabung. Jika dilihat di sini masyarakat sebagai *price taker* tidak dapat melakukan pilihan dalam konsumsi gas lpg 3 kg ini, sehingga pihak penjual dapat menentukan harga jual terutama penjual eceran yang tidak dapat dikontrol oleh pihak yang berwenang. Dengan kondisi ini, maka pihak penjual menentukan harga sangat tergantung dari biaya yang mereka keluarkan.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa agen LPG 3 kg sudah sangat banyak sekali dikarenakan harga gas 12 kg relatif mahal, sehingga masyarakat beralih untuk mengkonsumsi gas LPG 3 kg sebagai bahan bakar kebutuhan konsumsi masyarakat khususnya masyarakat di Kota Pematangsiantar. Berdasarkan hasil pengamatan, maka diperlukan sebuah rancangan distribusi LPG 3 kg, jika sistem tertutup diterapkan di wilayah Kota Pematangsiantar. Serta kebutuhan akan SPPBE yang dikarenakan oleh permintaan LPG 3kg yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Beberapa hal yang mengakibatkan peningkatan permintaan akan LPG 3kg di antaranya adalah (Nurbani, n.d.) 1) Ekspansi penggunaan LPG 12 kg ke LPG 3 kg akibat dari kenaikan harga LPG 12kg, 2) Meningkatnya usaha kecil dan menengah pengguna LPG 3kg, 3) Banyaknya warga berkategori mampu tetapi memakai gas ukuran 3 kg, 4) Restoran maupun hotel yang menggunakan gas ukuran 3 kg.

Dalam perhitungannya, penggunaan elpiji jauh lebih murah daripada minyak tanah. Harga gas LPG 3 kg yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah, dapat membantu kalangan masyarakat menengah ke bawah karena harganya terjangkau bagi masyarakat tersebut dalam program konversi dari minyak tanah ke gas. Walaupun masih terdapat masyarakat yang belum merasakan dampak positif karena kebijakan tersebut. Faktanya,

masih banyak masyarakat yang mengeluhkan harga karena ketersediaan pasokan gas yang masih terbatas sehingga menjadi langka dan harga tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Permasalahan harga yang sering dihadapi masyarakat di Kota Pematangsiantar adalah tidak stabilnya harga gas elpiji. Konsumen mempertimbangkan banyak faktor dalam memilih agen gas, salah satunya adalah harga.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Effendy, 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa harga yang terbentuk pada tingkat konsumen menyebabkan perbedaan yang cukup tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pihak Pertamina. Hal ini disebabkan setidaknya oleh beberapa faktor diantaranya adalah panjang pendeknya saluran distribusi yang terbentuk, biaya operasi yang timbul pada tingkat pengecer dan pengambilan untung yang relatif tinggi dari pangkalan serta pengecer. Tetapi pada kenyataannya konsumen di tingkat Kota Pematangsiantar tidak menerima harga sesuai dengan HET yang telah ditentukan pihak Pertamina. Dari pengamatan awal yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak meratanya jumlah pangkalan yang ada, sehingga tidak dapat menjangkau konsumen secara merata. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, kelangkaan ini terjadi dikarenakan *supply* barang tidak memenuhi demand dari pasar tersebut. Selain itu permasalahan yang terjadi di pangkalan/sub agen, stok persediaan elpiji yang diterima dari agen diwajibkan harus habis dalam waktu yang ditentukan. Sehingga sub agen harus menjual stok persediaan mereka kepada usaha mikro. Kondisi ini yang membuat stok barang di usaha mikro menjadi menumpuk dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya usaha mikro hanya bisa mendapatkan 8 hingga 10 tabung per bulannya. Namun realita yang terjadi mereka menerima 30 hingga 40 tabung per bulannya

Penelitian sebelumnya yang membahas masalah yang timbul sistem jual beli gas LPG sering membahas tentang sistem distribusi (Effendy, 2017) Sehingga daripada itu peluang usaha yang relatif menguntungkan menyebabkan timbulnya usaha pengecer-pengecer informal menyebabkan semakin panjangnya rantai distribusi. Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan bongkar muat menyebabkan harga jual mulai dari tingkat pangkalan sudah tidak sesuai dengan HET. Sehingga dapat dikatakan bahwa persediaan LPG 3kg berlebih dan harga diatas rata-rata karena diakibatkan sudah terlalu banyak agen LPG 3 kg informal.

Sedangkan kesimpulan penelitian (Hastuti, 2013) terdapat pengaruh yang signifikan harga gas elpiji terhadap keputusan pembelian pada pelanggan di Agen Putra Pangkep Elpiji Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Oleh karena itu, proses keputusan membeli bukan sekadar mengetahui berbagai faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam pembelian dan keputusan untuk membeli (Hastuti, 2013) Terdapat lima peran yang terjadi dalam keputusan membeli 1) Pemrakarsa (*initiator*). Orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk atau jasa tertentu; 2) Pemberi pengaruh (*influencer*). Orang yang pandangan/ nasihatnya memberi bobot dalam pengambilan keputusan akhir; 3) Pengambil keputusan (*decider*). Orang yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan keputusan pembelian, apakah membeli, apa yang dibeli, kapan hendak membeli, dengan bagaimana cara membeli, dan dimana akan membeli; 4) Pembeli (*buyer*). Orang yang melakukan pembelian nyata; dan 5) Pemakai (*user*) orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Karena pada hakekat nya pengambilan keputusan dalam pembelian adalah sebuah proses juntut memecahkan masalah. Namun konsumen keseringan, baik individu ataupun usaha mikro memiliki pemikiran yang



sama dalam memutuskan untuk melakukan pembelian. alaupun kenyataan yang seharusnya konsumen memilih barang yang sesuai kebutuhan dan manfaat yang diperlukan.

Menurut (Adnyana & Wardana, 2016) Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *Willingness to Pay* (WTP) konsumen ialah karakteristik produk. Latar belakang konsumen juga dapat mempengaruhi WTP konsumen terhadap suatu produk seperti pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pendidikan . Secara umum, faktor penentu WTP konsumen akan mau membeli dengan membayar lebih tinggi produk beras padi hibrida Hipa Jatim dibandingkan dengan padi hibrida lain ialah karena memiliki kualitas yang lebih baik. Maka dari itu di haraokan untuk dapat meningkatkan kualitas produk ,pemerintah perlu perhatian lebih dalam mengontrol pemasaran produk hipa Jatim agar produk tersebut menjadi unggulan produk hibrida dalam negeri.

Ketika akan membeli produk atau jasa konsumen sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor hal ini terbentuk oleh ruang lingkup pribadi maupun lingkungan yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian menurut (Kotler & Keller, 2011), yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan strategi harga yang cocok untuk konsumen di Indonesia, maka diperlukan penelitian yang membahas seberapa besar kemauan membayar (*Willingness to Pay* atau WTP) konsumen terhadap produk-produk hasil alam. WTP digunakan sebagai metode untuk mengetahui nilai maksimum yang bersedia dibayarkan oleh konsumen dari peningkatan kualitas sebuah produk. WTP adalah kemauan masyarakat untuk membayarkan sejumlah uang untuk akses atau memperoleh atau dapat menikmati sumberdaya alam yang telah rusak, dengan kata lain dari kondisi B yaitu kondisinya rusak untuk mendapatkan kondisi A yang kondisinya baik (Garda & Harini,

2018). Kelayakan nilai ekonomi pembelian gas LPG disesuaikan dengan modal, biaya operasional, dan biaya perawatan melalui pengukuran WTP (Schroeder dalam Arifin, 2017).

Menurut Indramawan dalam (Arnita & Aidar, 2018) menyimpulkan faktor yang sangat mempengaruhi kesediaan membayar setiap individu, salah satunya tingkat pendapatan individu dan tingkat pendidikan, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap besaran nilai kesediaan membayar individu. Sedangkan variabel usia, jumlah anggota keluarga, status pekerjaan dan jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar masyarakat. Selain itu, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah seperti jarak antara permukiman masyarakat dengan penyedia barang.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh (et al, 2020) menyatakan bahwa perbedaan karakteristik yang berasal dari faktor budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi dan keluarga, serta situasi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dan kesediaannya membayar lebih tinggi. Analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membayar sayuran organik. Variabel independen yang diduga mempengaruhi kesediaan membayar konsumen produk sayur organik adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, pekerjaan, pendapatan perbulan, harga produk dan penilaian konsumen terhadap kualitas produk

Salah satu cara yang berbeda dari penelitian sebelumnya untuk mengetahui nilai kemauan masyarakat untuk membayar (WTP) adalah dengan *Contingent Valuation Method (CVM)*. Metode penilaian kontingen melibatkan responden secara langsung, dalam survei, menanyakan secara langsung berapa banyak mereka akan bersedia untuk membayar pembelian gas LPG tersebut. Hal ini disebut "kontingen" penilaian, karena responden akan

diminta untuk menyatakan kesediaan mereka untuk membayar. CVM dilakukan pada responden melalui teknik survei untuk menyatakan kesediaan mereka untuk membayar (WTP) untuk mendapatkan manfaat atas barang dan jasa non pasar yang ditawarkan (Olorunfemi dalam Putri, 2015). Metode penilaian kontingen (CVM) paling umum digunakan untuk memperkirakan manfaat barang dan jasa lingkungan karena dapat membuat hipotesis pasar yang dapat digunakan untuk memperoleh kesediaan masyarakat untuk membayar (WTP) untuk perubahan barang non-pasar, sehingga CVM dapat digunakan untuk menetapkan manfaat barang dan jasa non-pasar tersebut (Damanik, 2019)

Demikian akhirnya dengan melihat adanya pengaruh harga terhadap keputusan pembelian gas elpiji. Selanjutnya dengan timbulnya permasalahan tentang perbedaan harga yang tidak sesuai dengan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah, maka penulis mengisi kekosongan penelitian terkait dengan WTP terhadap pembelian gas LPG di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor faktor kesediaan membayar gas elpiji di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini juga ingin mengetahui berapa nilai kesediaan membayar konsumen serta karakteristik konsumen dalam pembelian gas elpiji di Kota Pematangsiantar. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Harga LPG, Tingkat Pendapatan Masyarakat, dan Lokasi terhadap *Willingness to Pay* (WTP) Pembelian Gas LPG di Kota Pematangsiantar”**.

## **B. Batasan Masalah**

Sehubungan dengan luasnya sebaran lokasi distribusi dan penjualan gas LPG 3 kg. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi pada:

1. Penelitian ini hanya mencakup masyarakat pelanggan LPG di wilayah Kota Pematangsiantar tahun 2021.
2. Penelitian ini hanya membahas persoalan pembelian gas LPG 3 kg pada bulan April tahun 2021.
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah harga, tingkat pendapatan, dan lokasi. Sedangkan variabel dependen adalah *Willingness to Pay* (WTP) pembelian gas LPG.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh harga terhadap *Willingness to Pay* (WTP) pembelian gas LPG di Kota Pematangsiantar?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap *Willingness to Pay* (WTP) pembelian gas LPG di Kota Pematangsiantar?
3. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap *Willingness to Pay* (WTP) pembelian gas LPG di Kota Pematangsiantar?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap *Willingness to Pay* (WTP) pembelian gas LPG di Kota Pematangsiantar.

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap *Willingness to Pay* (WTP) pembelian gas LPG di Kota Pematangsiantar.
3. Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap *Willingness to Pay* (WTP) pembelian gas LPG di Kota Pematangsiantar.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dokumentasi serta dapat turut serta mengembangkan bidang ilmu ekonomi. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang hendak melakukan penelitian di bidang yang sama, serta dapat pula dijadikan buku pegangan bagi khalayak umum baik individu maupun perusahaan yang memiliki permasalahan yang serupa dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### **2. Manfaat Praktis**

Setelah penelitian ini selesai dan akhirnya didapatkan sebuah penemuan mengenai analisis *Willingness to Pay* terhadap pembelian gas LPG di Kota Pematangsiantar, maka peneliti mengharapkan agar seluruh khalayak umum baik individu maupun perusahaan dapat menerapkan strategi yang dapat dijadikan sebagai faktor *Willingness to Pay* (WTP) kepada masyarakat.

